

STRATEGI MENINGKATKAN PERAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO PEREMPUAN BERBASIS KOMODITI LOKAL DI TOISAPU AMBON

Restia Christianty¹, Dinatonía Matrutý²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura Ambon^{1,2}

Page | - 270 -

Correspondence Email: ercutey@yahoo.com

ABSTRAK

Toisapu Sub Vilage, bisnis mikro didominasi oleh perempuan yang bergerak di sektor informal yang tergabung dalam kelompok usaha perempuan yang memiliki bisnis pengolahan komoditas lokal (Juice Pala). Pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Wanita (LKMP) adalah langkah yang tepat dalam mendukung ekonomi pedesaan, karena mampu memberikan layanan yang fleksibel terutama dalam membiayai bisnis yang tidak layak untuk dibiayai oleh lembaga keuangan non-bankable.

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran LKMP Hunilai dan menganalisis faktor internal dan eksternal untuk menciptakan strategi mempertahankan keberadaan lembaga keuangan mikro. Menggunakan Metode analisis SWOT.

Hasil penelitian bahwa peran LKMP Hunilai mampu mengubah roda ekonomi pada skala mikro, memberikan akses mudah kemodal dalam bentuk dana, alat, pelatihan dan mampu menumbuhkan kepercayaan diri anggota LKMP Hunilai dalam meningkatkan peran mereka dalam keluarga dan masyarakat. Strategi pengembangan yang diperlukan adalah membuat payung hukum untuk LKMP dan kebijakan pendukung lainnya dalam mengoptimalkan peran LKMP untuk pengentasan kemiskinan di daerah pedesaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan memperkuat kerjasama dengan para pemangku kepentingan lainnya.

ABSTRACT

in Toisapu Sub Vilage, micro business is dominated by women engaged in the informal sector who are members of a women's business group that has a local commodity processing business (Nutmeg Juice). The development and empowerment of Women's Microfinance Institutions (LKMP) is the right step in supporting the rural economy, because it is able to provide flexible services, especially in financing businesses that are not feasible to be funded by non-bankable financial institutions.

This study aims to analyze the role of Hunilai LKMP and analyze internal and external factors to create a strategy to maintain the existence of microfinance institutions. Using the SWOT analysis method.

The results of the study showed that the role of the Hunilai LKMP was able to change the wheels of the economy on a micro scale, provide easy access to capital in the form of funds, tools, training and be able to foster the confidence of LKMP Hunilai members in increasing their role in families and communities. The development strategy needed is to create a legal umbrella for LKMPs and other supporting policies in optimizing the role of LKMPs to alleviate poverty in rural areas, increase human resource capacity and strengthen cooperation with other stakeholders.

Keywords: MFI, Women, Local Commodity, Ambon

PENDAHULUAN

Usaha Mikro di Indonesia merupakan salah satu alternatif kebijakan yang strategis untuk mengembangkan sector riil. Hal ini menandakan usaha mikro menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti membuka lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan pengelolaan keuangan yang sederhana. Kondisi ini searah kebijakan perekonomian yang berorientasi pada ekonomi berbasis komunitas serta pengembangan usaha mikro di masa datang. Para pelaku usaha ini pada umumnya masih dihadapkan pada permasalahan yang mendasar yaitu terbatasnya ketersediaan modal sebagai unsur penting yang mendukung peningkatan produksi dan pada gilirannya dapat mengangkat taraf hidup masyarakat pedesaan. Keterbatasan modal ini berpotensi membatasi ruang gerak ekonomi masyarakat pedesaan. Selain itu, keterbatasan modal juga dapat menjadi awal terjadinya siklus kemiskinan pada masyarakat pedesaan yang akan sulit untuk diputus.

Sektor perekonomian pedesaan Indonesia sudah seharusnya menjadi basis bagi pengembangan perekonomian nasional. Konsekuensinya, beragam alternatif upaya pengembangan menjadi penting untuk dikembangkan demi menopang berjalannya perekonomian pedesaan. Saat ini banyak sekali usaha-usaha mikro yang bergerak di kawasan pedesaan, namun keterbatasan akses permodalan ditambah budaya kewirausahaan yang tidak kondusif menjadi aspek yang senantiasa menghambat pertumbuhan sektor perekonomian kawasan pedesaan yang bergerak di sektor informal, begitu pun di Dusun Toisapu, usaha mikro yang didominasi perempuan bergerak di sektor informal yang tergabung dalam kelompok usaha perempuan yang memiliki usaha pembuatan Juz Pala.

Pengembangan dan pemberdayaan LKM Perempuan merupakan langkah tepat dalam menopang perekonomian pedesaan, karena LKM telah mengakar dan tumbuh bersama perkembangan masyarakat dan mampu memberikan pelayanan yang fleksibel, utamanya dalam pembiayaan usaha-usaha yang tidak layak dibiayai menurut lembaga keuangan konvensional (non-bankable). Pada gilirannya hal ini juga mendorong perekonomian desa karena tumbuhnya usaha-usaha mikro di pedesaan dapat mendorong terbukanya lapangan kerja baru. Pengembangan LKM juga mengadopsi konsep pengembangan perbankan untuk masyarakat miskin yang telah diperkenalkan oleh Muhammad Yunus, peraih Nobel dari Bangladesh yakni Grameen Bank, di mana konsep ini yang telah berhasil mengentaskan masyarakat miskin di Bangladesh. Di Indonesia, salah satu daerah yang telah mengembangkan LKM dengan konsep Grameen Bank adalah Kabupaten Jember, Jawa Timur melalui inovasi dengan mendirikan Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat Miskin (LKMM) atau yang dikenal dengan Bank Gakin (Bank Keluarga Miskin), yang telah berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jember .

Bertolak dari keberhasilan yang telah dicapai di Kabupaten Jember, maka Pemerintah Provinsi Maluku bekerjasama dengan Proyek ILO-UNIDO Pelagandong mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro Perempuan (LKMP) yang ditujukan untuk mengurangi penduduk miskin di Maluku dengan prioritas diberikan kepada kelompok perempuan. Salah satunya

adalah Kelompok Perempuan Hunilai, Dusun Toisapu Kota Ambon yang memproduksi Juice Pala, atas binaan program Pela Gandong Unido-ILO. Bantuan permodalan tersebut akan digunakan sebagai dana stimulan kelompok, khususnya kelompok perempuan miskin yang ada di pedesaan. Mekanisme pengelolaan keuangan menggunakan konsep tanggung renteng (barantang). Di sini, pengembalian pinjaman merupakan tanggung jawab bersama dalam satu kelompok.

Keberadaan dan perkembangan LKMP tidak terlepas dari perkembangan Usaha Kecil dan Mikro (UKM) anggotanya. Sejauh ini jumlah anggota LKMP Hunilai berjumlah 122 orang. Upaya ini diharapkan dapat mendorong perkembangan dan pembangunan ekonomi pedesaan melalui penciptaan pola pembiayaan yang kondusif terhadap pertumbuhan usaha mikro. Pada gilirannya, diharapkan usaha-usaha berskala mikro yang tumbuh ini dapat menyerap tenaga kerja pedesaan yang kemudian diikuti juga oleh peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat pedesaan, sehingga dibutuhkan strategi yang tepat untuk pengembangan LKMP. Penelitian yang akan dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui peranan LKMP Hunilai dalam mengembangkan sektor perekonomian desa dan menentukan strategi yang diperlukan dalam rangka mengembangkan kapasitas LKMP Hunilai untuk menopang perekonomian desa.

Konsep Keuangan Mikro

Sejak akhir tahun 1990-an, LKM telah berkembang sebagai alat pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Tujuan LKM sebagai organisasi pembangunan adalah untuk melayani kebutuhan finansial dari mereka yang tidak terlayani atau tidak dilayani dengan baik sebagai salah satu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan seperti menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, membantu usaha-usaha yang telah ada untuk meningkatkan atau mendiversifikasikan usahanya, memberdayakan perempuan atau kelompok masyarakat lainnya yang kurang beruntung (masyarakat miskin atau orang-orang yang berpenghasilan rendah) dan mendorong pengembangan usaha baru.

Keuangan mikro sendiri adalah penyediaan layanan keuangan kepada masyarakat miskin secara berkelanjutan. Seperti halnya beberapa strategi pembangunan lain, ini mencakup kombinasi antara keadilan dan efisiensi karena akses kepada layanan keuangan sekaligus melindungi dan memberdayakan masyarakat miskin dengan memberi mereka pilihan. Meskipun demikian, sebagian besar lembaga tidak berorientasi kepada yang miskin serta tidak memiliki misi sosial. Yang membedakan keuangan mikro dengan keuangan konvensional adalah tujuan untuk melayani masyarakat miskin dan umumnya masyarakat di luar jangkauan pasar keuangan formal, tanpa subsidi terus menerus. Keuangan mikro tidak terlepas dari keberadaan usaha mikro dan usaha kecil, sebagai upaya untuk mendukung pengembangan usaha mikro yang keberadaannya dicirikan oleh serangkaian aturan yang dinamis, inovatif dan lentur yang dirancang sesuai kondisi lingkungan sosial

dan ekonomi lokal. LKM merupakan suatu fenomena yang kompleks yang berdimensi ekonomi dan sosio-kultural.

Defenisi LKM merujuk pada fungsi keuangan mikro sebagai upaya penyediaan jasa keuangan, terutama simpanan dan pinjaman dan juga jasa keuangan lain yang diperuntukan bagi keluarga miskin dan berpenghasilan rendah yang mencakup pedagang kecil, pedagang kaki lima, petani kecil, penjual jasa, produsen kecil, penjahit yang tidak memiliki akses terhadap bank komersial (Ledgerwood, 1999) dan memberikan fokus pelayanan kepada perempuan. Sementara Meagher (2002) berpendapat bahwa lembaga keuangan mikro adalah lembaga yang memberikan pinjaman uang dalam jumlah kecil dan dalam jangka waktu yang singkat dengan frekuensi pelunasan yang tinggi. Bank Pembangunan Asia (ADB) mendefinisikan keuangan mikro sebagai penyedia jasa- jasa keuangan dalam ragam yang luas seperti tabungan, pinjaman, jasa pembayaran, pengiriman uang dan asuransi untuk rumah tangga miskin serta berpenghasilan rendah dan usaha-usaha mikro mereka (ADB, 2000).

Dalam pelaksanaannya, selain perantara keuangan, LKM juga menyediakan jasa perantara sosial, seperti pembentukan kelompok, pengembangan kepercayaan diri, pelatihan pengetahuan keuangan dan kemampuan manajemen untuk anggota kelompok yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Salah satu alasannya adalah karena orang-orang berpenghasilan rendah harus berjuang menghadapi hambatan yang berat seperti buta huruf, diskriminasi gender dan keterpencilan usaha dalam memperoleh akses terhadap lembaga jasa keuangan konvensional. Hal ini berarti bahwa selain memberikan akses kepada orang-orang berpenghasilan rendah terhadap pengadaan pinjaman, keterampilan dan kepercayaan diri mereka juga harus ditingkatkan. Oleh karena itu, pendekatan keuangan mikro bukanlah pendekatan minimalis yang hanya berperan sebagai lembaga perantara keuangan saja akan tetapi merupakan pendekatan terpadu yang menawarkan jasa-jasa lain seperti yang telah disebutkan di atas (Ledgerwood, 1999).

Kehadiran LKM dibutuhkan paling tidak karena dua hal (Pantoro, 2008). Pertama, sebagai salah satu instrumen dalam rangka mengatasi kemiskinan. Masyarakat miskin pada umumnya mempunyai usaha skala mikro. Terminologi World Bank, mereka disebut sebagai economically active poor atau pengusaha mikro. Dalam konfigurasi perekonomian Indonesia, lebih dari 90persen unit usaha merupakan usaha skala mikro. Mengembangkan usaha skala mikro merupakan langkah strategis karena akan mewujudkan broad bases development atau development through equity. Mereka membutuhkan permodalan guna mengembangkan kapasitas usahanya. melalui peningkatan usaha secara efektif akan mengatasi kemiskinan yang diderita oleh mereka sendiri dan diharapkan dapat membantu masyarakat dalam kategori fakir miskin. Pada sisi lain, skim keuangan mikro sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah. Kedua, LKM dibutuhkan karena menjadi salah satu instrumen pengembangan pasar keuangan mikro.

Ragam Layanan Keuangan Mikro

Keuangan mikro pada umumnya diasosiasikan dengan kredit modal kerja yang diinvestasikan untuk usaha mikro atau kegiatan menghasilkan pendapatan (income generation) dalam jumlah kecil. Kredit usaha mikro merupakan bagian penting dalam menu layanan keuangan mikro. Masyarakat berpendapatan rendah memiliki kebutuhan akan jasa keuangan seperti yang lain, tetapi dirancang dan disalurkan sesuai dengan karakteristik mereka seperti: tidak menentunya pendapatan, waktu yang lama dengan aliran kas negatif, rentan terkena risiko dan lokasi yang susah dijangkau karena keterbatasan prasarana.

Tanpa akses kepada layanan keuangan formal, masyarakat miskin harus bergantung kepada sumber informal, seperti teman dan keluarga, arisan, melepas uang dan mengumpulkan tabungan informal dan tabungan barang. Jasa keuangan informal ini memiliki ciri yang sesuai dengan target pasarnya. Mudah dijangkau, memerlukan administrasi secara minimal atau tidak sama sekali, dan dapat secara cepat tersedia. Tapi pada kenyataannya LKM dapat belajar banyak dengan mempelajari karakteristik positif dari penyedia jasa keuangan informal. Dengan menyediakan berbagai layanan keuangan, LKM memberikan manfaat kepada nasabah dan mereka sendiri untuk mendapatkan keuntungan.

Keuntungan dari LKM meliputi: a). Memberikan layanan kepada pasar yang lebih luas. Dengan menjadi lembaga keuangan yang melayani masyarakat berpendapatan rendah, LKM mampu memperluas jangkauan layanannya di luar nasabah mikro; b). Diversifikasi risiko. Menawarkan kredit untuk berbagai tujuan, seperti perumahan atau pendidikan, dapat menghindari konsentrasi dibanding dengan hanya memberikan pinjaman kepada pengusaha mikro; c). Diversifikasi sumber pendapatan. LKM yang menawarkan jasa berdasarkan fee, seperti pengiriman uang atau asuransi dapat menghasilkan pendapatan tanpa menanggung risiko tambahan; d). Menurunkan biaya dana. Dengan menyediakan fasilitas tabungan kepada masyarakat luas, LKM dapat mengumpulkan cukup sumber dana untuk membiayai portofolio pinjaman; e). Memberikan dampak secara luas. LKM pada umumnya berusaha mewujudkan misi sosial, seperti menurunkan pengangguran atau meningkatkan pembangunan ekonomi. Menu produk yang beragam memungkinkan LKM memberikan dampak yang lebih luas dibandingkan kredit mikro.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di LKM Perempuan Hunilai dusun Toisapu. Alasan pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan perkembangan LKMP Hunilai yang cukup baik dibandingkan LKMP lainnya. Penelitian bersifat deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Bersifat deskriptif dan kualitatif karena bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang peranan LKMP dalam konteks pembangunan ekonomi pedesaan. Data tambahan yang berkaitan dengan topik penelitian didapatkan melalui studi dokumen yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang diperoleh secara kualitatif di lapangan akan

dianalisis dengan analisis SWOT. Metode SWOT adalah salah satu alat identifikasi berbagai variabel secara sistematis yang didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strength) dan peluang (Opportunities) namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weakness) dan ancaman (Threats).

HASIL PENELITIAN

Faktor Internal LKMP Hunilai

Aspek SDM

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola LKMP Hunilai dapat dilihat dari tingkat pendidikan formal pengelola dan frekuensi pelatihan yang terkait dengan tugas serta pengalaman pengelola. Tingkat pendidikan dan pengetahuan yang memadai dikalangan pengurus juga merupakan salah satu faktor yang menjadi kunci keberhasilan LKMP Hunilai. Bila dilihat dari segi rata-rata pendidikan pengurus, menunjukkan bahwa LKMP Hunilai dikelola oleh SDM yang memiliki tingkat pendidikan yang cukup memadai. Pengurus sangat aktif dalam berbagai pelatihan yang diselenggarakan oleh NGO lokal, International NGO maupun instansi terkait. Dukungan terhadap pengembangan SDM relatif cukup mendapat porsi yang besar dalam program peningkatan kapasitas SDM. Pelatihan-pelatihan yang diikuti beragam mulai dari dinamika kelompok, pelatihan mental/ spiritual yang diarahkan guna membangun pemikiran yang kuat dan kreatif, hingga sesi-sesi yang dirancang untuk mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan manajemen profesional.

Aspek Permodalan

Permodalan LKMP Hunilai berasal dari Pemerintah Provinsi Maluku melalui biro SDM Setda Provinsi Maluku berupa suntikan modal sebesar Rp. 45.000.000,00 yang dicairkan dalam dua tahap dan modal yang berasal dari iuran anggota. Suntikan modal tersebut dimanfaatkan untuk mengembangkan produktivitas dari UKM yang tergabung dalam LKMP Hunilai yang diharapkan dapat mendongkrak perekonomian Dusun Toisapu. Modal yang diberikan kepada anggota diberikan dalam bentuk pinjaman modal usaha guna meningkatkan produksi produk yang mereka hasilkan.

Kepengurusan

Struktur kepengurusan terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan anggota. Pengelolaan LKMP Hunilai masih bersifat konvensional karena belum didukung dengan sistem pencatatan yang terkomputerisasi, selain itu rekrutmen masih tidak didasarkan pada kualifikasi kapabilitas yang standar. Namun kerjasama antar pengurus berjalan dengan baik, pengurus bekerja sesuai dengan tupoksi nya masing-masing.

Faktor Eksternal LKMP Hunilai

Pemerintahan Desa

Dukungan pemerintahan Desa Hutumuri yang merupakan desa induk dusun Toisapu cukup baik. Jarak antara Desa Hutumuri dan Dusun Toisapu kurang lebih 1 Km namun hal ini tetap tidak menumpulkan dukungan penuh dari pemerintahan Desa demi berjalannya

roda perekonomian secara mikro di lokasi LKMP Hunilai. Walaupun berada di dusun Toisapu, namun anggota LKMP Hunilai juga berasal desa Huutmuri. karena hal ini berdampak positif bagi warga setempat terutama dalam menciptakan lapangan kerja, sejauh ini sudah ada 122 orang yang terserap dalam kegiatan ekonomi mikro di LKMP Hunilai.

Dinas Terkait dan International NGO

Sejauh dukungan pemerintah daerah Provinsi Maluku cukup baik, khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Tidak jarang produk-produk yang dihasilkan UKM anggota LKMP Hunilai dipromosikan lewat pameran yang diselenggarakan di dalam maupun di luar daerah. Bantuan peralatan produksi juga diberikan oleh dinas Perindag. Sebelumnya, LKMP Hunilai menjadi binaan program pela gandong UNIDO-ILO. LKMP Hunilai juga banyak mendapat pelatihan-pelatihan demi memperkuat potensi yang ada, baik berupa soft skill maupun hard skill dari dinas-dinas terkait.

Regulasi

Sampai saat ini belum ada payung hukum yang jelas mengatur jalannya LKMP. Jika LKM Psudah memiliki payung hukum, maka akan membuat akses masyarakat kecil terhadap lembaga keuangan semakin membaik, karena potensi pembiayaan lembaga keuangan mikro sangatlah besar. Pembiayaan sektor perbankan secara formal 40 persen sisanya masuk ke pembiayaan sektor informal.

Penentuan Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman LKMP Hunilai

KEKUATAN

Kekeluargaan

LKMP Hunilai terbangun atas azaz kekeluargaan dan kebersamaan yang telah mengakar di dalam masyarakat dusun Toisapu, dan hal ini terbawa didalam kepengurusan. Hal ini merupakan nilai tambah bagi LKMP Hunilai dan unsur didalamnya, sehingga bukan hanya sekedar nilai ekonomis nya saja yang terpenuhi tetapi ada juga jalinan sosial di dalamnya. Melalui kelompok kerja, semangat kerja tim untuk mengembangkan usaha semakin kuat dan hasilnya mereka dapat mengembangkan sistem komunikasi yang baik diantara mereka. Sesama anggota berinteraksi satu sama lain karena mereka saling membantu agar kelangsungan usaha tetap berjalan.

Kepercayaan Diri

Selama ini perempuan di dusun Toisapu lebih banyak bersinggungan dengan urusan domestik, namun setelah menjadi anggota LKMP Hunilai mereka semakin percaya diri dalam menyampaikan ide, baik didalam kelompok maupun dalam pengambilan keputusan di dalam keluarga yang biasanya didominasi oleh laki-laki dan keputusan diambil bersama dengan mempertimbangkan pendapat keduanya (suami dan isteri). Diluar lingkungan keluarga, keberadaan kelompok Hunilai dapat memperkuat posisi perempuan dalam proses pengambilan keputusan ditingkat desa. Mereka teribat dalam proses MusrenbangDes walaupun belum dilibatkan secara penuh.

Produksi Komoditas

Produk yang dihasilkan oleh UKM anggota LKMP Hunilai adalah produk olahan buah pala, yang menjadi komoditi lokal dusun Toisapu. Selama ini buah Pala hanya diambil bunga dan biji nya saja, sementara daging buah pala lebih banyak dibuang. Hasil olahan buah pala berupa Juice Pala dan Manisan Pala. Produk yang dihasilkan dijual di beberapa super markket dan toko oleh-oleh di kota Ambon. Selain itu, pesanan juga berasal dari luar Maluku seperti Jakarta dan Negeri Belanda.

KELEMAHAN

Keterbatasan Sumber Dana

Bagi LKMP Hunilai dana merupakan instrumen yang sangat penting, bukan saja untuk membiayai seluruh aktivitasnya, tetapi jua menjadi komoditas utama sebagai lembaga simpan pinjam sehingga mampu memberikan pinjaman kepada UKM. Selama ini sumber modal LKMP Hunilai berasal dari dana hibah provinsi Maluku, namun dana tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan modal UKM yang tergabung dalam LKMP Hunilai.

Belum ada Rumah Kemasan

Kemasan menjadi komponen penting dalam pemasaran produk. Kemasan sangat berpengaruh terhadap suatu produk yang akan dipasarkan atau dijual. Selain untuk menjaganya, kemasan juga dapat mempercantik sebuah produk yang dapat menarik minat pembelinya. Sampai saat ini, kemasan masih dipesan dari luar Maluku, sehingga beban biaya transportasi yang tinggi dirasakan cukup berat bagi UKM anggota LKM.

Manajemen resiko yang belum efektif.

Sampai sejauh ini, sistem penanganan pinjaman bermasalah belum diterapkan dengan baik. Walaupun ada jaminan kelompok terhadap anggota yang menunggak (tanggung renteng/barantang), namun sistem punishment belum diterapkan dengan baik, disamping itu belum dilakukan penggolongan piutang.

PELUANG

Banyaknya Sumber Dana dari Luar

Sebagai Lembaga Keuangan Mikro, LKMP Hunilai memerlukan bantuan dan kerjasama dengan berbagai pihak, baik itu dari pemerintahan, NGO maupun lembaga keuangan lainnya termasuk formal maupun informal guna memberikan akses permodalan dan peningkatan kapasitas pengurus dan anggota. Hal ini merupakan peluang bagi LKMP Hunilai untuk dapat mengakses dana maupun pelatihan peningkatan kapasitas dari berbagai stake holders

Banyaknya UKM yang berpotensi dalam melakukan kerja sama

Permintaan modal dari UKM di dusun Toisapu maupun desa Hutumuri cukup tinggi. Hal ini dikarenakan sulitnya birokrasi keuangan yang ada di lembaga formal ini, maka LKMP Hunilai hadir untuk dapat memberikan alternatif sumber permodalan bagi UKM dan menyalurkan kreditnya dengan sifatnya yang fleksibel.

Pariwisata Maluku

Meningkatnya kunjungan wisata di Maluku, memberikan peluang bagi pemasaran oleh-oleh khas Maluku, salah satunya Juice Pala. Juice Pala bisa diperoleh di toko oleh-oleh dan restoran yang tersebar di kota Ambon.

ANCAMAN

Regulasi

Belum adanya payung hukum yang jelas, membuat LKMP sebagai lembaga yang masih rentan, sehingga dalam menjalankan perannya terkadang LKMP sering terbentur dengan tidak adanya kekuatan hukum, namun payung hukum ini juga akan menimbulkan sisi dilematis karena ditakuti dengan adanya payung hukum yang mengatur akan menyebabkan LKM kehilangan jati dirinya sebagai lembaga keuangan yang “fleksibel”.

Lembaga keuangan lainnya

Keberadaan lembaga keuangan lain, seperti koperasi simpan pinjam dapat menjadi ancaman bagi keberlanjutan LKMP Hunilai. Dengan penawaran produk pinjaman yang beragam dari lembaga keuangan lain dapat memberikan alternatif pinjaman bagi UKM yang menginginkan pelayanan yang lebih baik.

PEMBAHASAN

Berdasarkan uraian diatas, berikut strategi pengembangan LKMP Hunilai dengan menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT akan menghasilkan berbagai strategi pengembangan LKMP Hunilai dengan dilakukannya analisis terhadap faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal. Dari hasil analisa maka didapat beberapa alternatif strategi yang menjadi prioritas utama dalam upaya pengembangan LKMP Hunilai:

Pengembangan kapasitas kelembagaan LKMP Untuk mempersiapkan SDM pengelola LKMP yang berkualitas, pengembangan kapasitas kelembagaan dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga pendamping, dunia usaha, lembaga internasional, kerjasama antar LKMP dan instansi pemerintah. Kerjasama dapat dilakukan terutama dalam peningkatan kemampuan SDM, sistem dan prosedur operasi, teknologi, jaringan usaha dan aksesibilitas terhadap berbagai dukungan dalam meningkatkan jangkauan pelayanan kepada masyarakat.

Memberikan kepastian hukum kepada LKMP Hal ini perlu dilakukan dengan tujuan memberikan status hukum yang jelas kepada LKMP sehingga memungkinkan bank dan lembaga keuangan lainnya untuk melakukan hubungan bisnis yang wajar dengan LKMP serta mengizinkan LKMP untuk menghimpun simpanan masyarakat dalam wilayah dan jumlah tertentu.

Penciptaan sistem pengaturan dan pengawasan yang efisien Mendelegasikan pengaturan dan pengawasan kepada lembaga yang sesuai di daerah (provinsi/kabupaten), memastikan memadainya pendanaan, SDM pengawas, serta melakukan penilaian kinerja LKMP.

Integrasi LKM dengan perbankan. Pengembangan LKMP diarahkan untuk menjadi mitra bank di desa. Melalui LKMP, pihak bank dapat memanfaatkan jaringan LKMP yang tersebar di pelosok desa untuk menyalurkan jasa pembiayaannya melalui LKMP. Pemerintah dapat menjadi fasilitator terjalannya kerjasama antara LKMP dengan pihak perbankan.

Koordinasi dan sinkronisasi program lintas sektoral dalam pemberdayaan dan transformasi LKMP. Sasaran pelaksanaan strategi pengembangan LKMP ini adalah beralihnya LKMP yang belum berbadan hukum menjadi lembaga keuangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses peralihan atau transformasi ini diawali dengan terlebih dahulu melakukan pendataan, edukasi dan sosialisasi terhadap LKMP yang belum berbadan hukum tersebut. Namun transformasi ini dilakukan dengan tahapan-tahapan yang matang sehingga fungsi dan peran LKM menjadi semakin besar bagi pengentasan kemiskinan di perdesaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap LKMP Hunilai, maka diperoleh kesimpulan sebagai bahwa LKMP Hunilai berperan cukup besar dalam mendorong ekonomi lokal dan mampu merekrut 122 anggota, ini menunjukkan LKMP dapat menjadi salah satu jawaban untuk bisa menopang perekonomian Desa Hutumuri, khususnya dusun Toisapu.

Pengembangan LKMP Hunilai berdasarkan pemilihan strategi alternatif utama, yaitu Pengembangan kapasitas kelembagaan LKM, Memberikan kepastian hukum kepada LKMP, Koordinasi dan sinkronisasi program lintas sektoral dalam pemberdayaan dan transformasi LKMP.

Sasaran pelaksanaan strategi pengembangan LKMP ini adalah beralihnya LKMP yang belum berbadan hukum menjadi lembaga keuangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses peralihan atau transformasi ini diawali dengan terlebih dahulu melakukan pendataan, edukasi dan sosialisasi terhadap LKMP yang belum berbadan hukum tersebut. Namun transformasi ini dilakukan dengan tahapan-tahapan yang matang sehingga fungsi dan peran LKM menjadi semakin besar bagi pengentasan kemiskinan di perdesaan.

REKOMENDASI

Untuk mempersiapkan SDM pengelola LKMP yang berkualitas, pengembangan kapasitas kelembagaan dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga pendamping, dunia usaha, lembaga internasional, kerjasama antar LKMP dan instansi pemerintah. Kerjasama dapat dilakukan terutama dalam peningkatan kemampuan SDM, sistem dan prosedur operasi, teknologi, jaringan usaha dan aksesibilitas terhadap berbagai dukungan dalam meningkatkan jangkauan pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah memperkuat aturan hukum yang melandasi operasional LKMP yang didukung Undang-Undang Koperasi dan peraturan pendukung lainnya.

Serta, Perlunya kebijakan yang mewajibkan anggota LKMP untuk mengikuti pembinaan dari LKMP dan menyerahkan laporan keuangan usaha secara periodik kepada LKMP. Hal ini dilakukan untuk mengurangi terjadi penyimpangan pemanfaatan kredit yang diberikan.

DAFTAR REFERENSI

- ADB. 2000. Finance for the Poor: Microfinance Development Strategy. Manila. Asian Development Bank.
- Ledgerwood, Joanna. 1999. Microfinance Handbook. An Institutional and Financial Perspective. Washington DC.: The World Bank.
- Nasution, Irfan (ed). 2007. Bank Kaum Miskin: Kisah Yunus dan Grameen Bank
- Krishnamurti, B. 2003. Pengembangan Keuangan Mikro dan Penanggulangan Kemiskinan. Jurnal Ekonomi Rakyat, Artikel - Th. II - No. 2 - April 2003.
- Meagher, Patrick. 2002. Microfinance Regulation in Developing Countries: A Comparative Review Of Current Practice, Mimeo. College Park: IRIS Center, University of Maryland
- Pantoro, Setyo. 2008. Pendekatan Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Implikasinya. Koran-rakyat-online.
- Siu, Peter. 2001. Increasing Access to Microfinance Using Information and Communications Technologies, Chemonics International.
- Rangkuti, Freddy. 1999, Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis. PT Gramedia Utama. Jakarta.